

SIARAN PERS:

# APRIL Terus Membabat Hutan Alam di Kalimantan



## KOALISI ANTI MAFIA HUTAN:



**Jakarta, 6 Oktober 2020**—Koalisi Anti Mafia Hutan menerbitkan laporan terbaru *Membabat Hutan Tanpa Henti: Hubungan dengan Adindo Hutani Lestari Menciderai Komitmen Tanpa Deforestasi APRIL Grup*. Laporan ini menyorot deforestasi dan degradasi lahan gambut di konsesi PT Adindo Hutani Lestari, Kalimantan Utara. Dan keterkaitannya dengan APRIL Grup atau grup induknya Royal Golden Eagle (RGE) Grup, salah satu penghasil pulp, kertas, dan viscose terbesar di Dunia.

PT Adindo Hutani Lestari (baca Adindo), merupakan perusahaan pemegang konsesi hutan tanaman industri di Kalimantan Utara. Perusahaan ini tercatat sebagai pemasok pasar terbuka (*open market supplier*) untuk pabrik pulpanya APRIL Grup. Selama periode Juni 2015 sampai Agustus 2020, Adindo teridentifikasi menghancurkan hutan alam sekitar 10.000 kali lapangan bola (7.291 hektare). Sekitar 3.790 di antaranya merupakan lahan gambut.

Dari total penghancuran hutan alam tersebut, lebih dari 3.769 hektare (50%) teridentifikasi sebagai areal Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value—HCV) dari berbagai kategori, berdasarkan asesmen Tropenbos pada 2014. Hampir semua deforestasi yang terjadi di kawasan HCV berada di lokasi yang ditetapkan pada peta Tropenbos sebagai “tanaman pokok dengan water management”, terminology yang nampaknya merujuk pada kawasan lahan gambut yang telah ditetapkan memiliki Nilai Konservasi Tinggi.

Industri pulp dan kertas milik APRIL Grup yang memasok kayu dari Adindo yaitu PT Riau Andalan Pulp & Paper. Selama periode 2015-2019, perusahaan ini telah memasok lebih dari 2,3 juta ton meter kubik kayu dari Adindo. Padahal pada 2015, APRIL Grup dan perusahaan induknya Royal Golden Eagle (RGE) International telah berkomitmen untuk menghentikan penebangan hutan alam dan pengrusakan lahan gambut. Kebijakan ini dituangkan dalam [Sustainable Forest Management Policy 2.0](#).

Selain hal di atas, Koalisi juga menemukan kelindan korporat antara APRIL Grup dan Adindo. Menurut APRIL Grup, Adindo merupakan “[pemasok pasar terbuka](#),” dan tidak memiliki afiliasi dengan APRIL. Namun, Koalisi menemukan indikasi adanya keterkaitan Adindo dengan APRIL Grup maupun RGE Grup, termasuk dengan pemilik manfaatnya grup-grup tersebut, Sukanto Tanoto. Model struktur kepemilikan Adindo yang kompleks dan berhubungan dengan perusahaan-perusahaan *offshore* dan beberapa perusahaan di negara surga pajak, dengan efek mengaburkan keberadaan pengendali perusahaan.

Atas dasar temuan tersebut, Koalisi Anti Mafia Hutan menyampaikan rekomendasi berikut:

1. PT Adindo Hutani Lestari untuk segera menghentikan kegiatan deforestasi dan pembangunan HTI baru di lahan gambut;
2. APRIL Grup untuk mengungkap ke publik terkait deforestasi di konsesi Adindo dan menjelaskan keterkaitan korporat antara Adindo dan APRIL Grup;
3. Forest Stewardship Council (FSC) untuk tangguhkan aktivitas yang terkait dengan roadmap APRIL untuk dikaitkan kembali dengan FSC, setidaknya hingga independen investigasi deforestasi yang terdokumentasi di PT Adindo Hutani Lestari;
4. Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM untuk segera memverifikasi pemilik manfaat korporasi (*beneficial ownership*) PT Adindo Hutani Lestari dan mengungkapkannya ke publik, sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018;
5. Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memeriksa pembayaran penerimaan negara bukan pajak (Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi) oleh PT Adindo Hutani Lestari berkaitan adanya dugaan penebangan hutan alam selama periode 2015-2020.

### Catatan Redaksi

- APRIL dan perusahaan induknya, yaitu Royal Golden Eagle (RGE), mulai menerapkan komitmen “no-deforestasi” pada bulan Juni 2015. Kebijakan APRIL menyatakan bahwa, “Berlaku efektif segera, APRIL dan para pemasoknya hanya akan mengembangkan wilayah yang tidak berhutan, sesuai hasil identifikasi melalui penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) yang independen dan dinilai oleh rekan sejawat [... dan] APRIL tidak akan mengakuisisi lahan baru, atau surat izin kehutanan lainnya, atau menerima kayu dari lahan pihak ketiga, di mana penjualnya setelah tanggal 3 Juni 2015 diketahui telah membuka lahan di hutan NKT atau SKT, maupun lahan gambut yang berhutan.”
- PT Adindo Hutani Lestari (Adindo) memasokkan serat kayu pada pabrik APRIL di Kecamatan Pangkalan Kerinci setidaknya sejak tahun 2006. Selama APRIL menerapkan komitmen SFMP 2.0 sejak tahun 2015, Adindo termasuk dalam urutan lima pemasok kayu pulp terbesar dari segi volume pengiriman bahan baku kayu pada perusahaan pabrik pulp APRIL, yaitu PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP).
- Analisis citra satelit mengindikasikan bahwa laju deforestasi yang cukup signifikan terjadi di dalam areal konsesi Adindo setelah komitmen SFMP 2.0 APRIL mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2015. Deforestasi ini terdeteksi menggunakan peta klasifikasi penutupan lahan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan data kehilangan tutupan hutan global yang diterbitkan oleh University of Maryland berdasarkan citra Landsat dari satelit NASA.
- Berdasarkan peta fungsi ekosistem gambut nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017, lebih dari separuh deforestasi di areal konsesi Adindo yang terjadi sejak tanggal 3 Juni 2015 – yakni 3.790 ha dari total deforestasi seluas 7.291 ha – terjadi di lahan gambut yang kaya akan karbon. Di berbagai daerah, degradasi lahan gambut menjadi salah satu penyebab utama atas kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap, seperti yang terjadi pada tahun 2015.
- APRIL menggambarkan Adindo sebagai salah satu dari sembilan “Pemasok Pasar Terbuka”. [Situs web APRIL](#) menyatakan bahwa “Pemasok Pasar Terbuka adalah pemasok serat yang tidak berkontribusi pada komitmen [1-untuk-1 APRIL] dan dikontrak untuk pembelian pasokan pasar terbuka.”
- KPMG Performance Registrar Inc. telah menyediakan “laporan jaminan” untuk menilai pelaksanaan kebijakan keberlanjutan APRIL. Laporan KPMG gagal mendeteksi dan/atau melaporkan deforestasi dan degradasi lahan gambut yang terjadi di Adindo sehingga menimbulkan keprihatinan akan kehandalan laporan tersebut dalam memonitor kinerja keberlanjutan APRIL.
- Adindo menjadi bagian dari jaringan kompleks yang mengkaitkannya dengan perusahaan dan perorangan yang berkaitan dengan APRIL Grup dan perusahaan induknya, yaitu RGE Grup. Jaringan tersebut setidaknya mencakup sepuluh perusahaan yang berdomisili di Indonesia dan PERNAH terdaftar di alamat yang berkaitan dengan RGE dan para afliasinya. Sebagian besar perusahaan Indonesia tersebut dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh perusahaan induk yang terdaftar di yurisdiksi lepas pantai.
- Setidaknya lima orang individu yang berkaitan erat dengan APRIL dan RGE, termasuk Sukanto Tanoto dan isterinya, pernah atau masih berkaitan dengan perusahaan induk yang memegang kendali langsung maupun tidak langsung atas Adindo.
- Sepertinya Adindo belum mematuhi peraturan dari Pemerintah Indonesia, yang dari bulan Maret 2019, mewajibkan seluruh perusahaan untuk mengumumkan nama pemilik manfaatnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 mengartikan “pemilik manfaat” sebagai “perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung [...]”

- Pada tahun 2018 dan 2019, Koalisi Anti Mafia Hutan menerbitkan laporan tentang deforestasi di areal konsesi salah satu pemasok APRIL lain, yaitu PT Fajar Surya Swadaya. Kasus tersebut diteruskan dalam pengaduan kepada Forest Stewardship Council, yang menganggapnya kredibel sehingga melakukan investigasi sendiri untuk membenarkan adanya deforestasi. Menanggapi laporan awal Koalisi dari tahun 2018, pesaing APRIL, yaitu PT Asia Pulp & Paper (APP) mengakui deforestasi tersebut dan menghentikan pembelian kayu dari PT Fajar Surya Swadaya. Meskipun demikian, pada tahun 2019, APRIL menggandakan pembelian kayu dari pemasok tersebut dibanding tahun sebelumnya.
- Temuan laporan dapat berdampak pada keputusan Forest Stewardship Council (FSC) untuk memulai proses reasosiasi dengan APRIL setelah tuduhan deforestasi mengakibatkan pembekuan pada tahun 2013. Lambang FSC yang tertera pada produk kehutanan, seperti produk APRIL, menyediakan akses pada pasar pembeli yang '*conscientious*' dan/atau harga tinggi. FSC membekukan proses reasosiasi dengan APP pada tahun 2018 setelah persoalan serupa mengenai struktur korporat sempat terungkap di media massa dan investigasi oleh pihak masyarakat sipil.
- Pulp APRIL semakin banyak digunakan dalam produksi tekstil, seperti pakaian dan bahan medis. Melalui perusahaan afiliasinya, Sateri dan Asia Pacific Rayon, sekarang sebagian pulp APRIL diolah menjadi viscose-rayon. Diyakini bahwa antara konsumen Sateri dan Asia Pacific Rayon terdapat berbagai merek pakaian global ternama, toko pakaian terkenal, dan penjual online.

**Narahubung:**

- Okto Yugo : [otoy.yugo@gmail.com](mailto:otoy.yugo@gmail.com)
- Yohana Tiko : [tiko@walhikaltim.or.id](mailto:tiko@walhikaltim.or.id)
- Syahrul Fitra : [syahrul@auriga.or.id](mailto:syahrul@auriga.or.id)